

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi atau dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi untuk menghasilkan output.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam pertumbuhan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.¹ Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan lahan untuk tujuan-tujuan ekonomi. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau

¹ Statistik Keuangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2008., hal. 3

mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Dan, sebagai stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di daerahnya.

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di Kota Bandung. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 34.816,96 km².

Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas; masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah JABOTABEK (sekitar Jakarta) dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sendiri saat ini lebih dari 43 juta jiwa yang tersebar di 17 kabupaten yaitu: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan 9 kota yaitu: Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar.²

² www.jabarprov.go.id

Dalam hal ini, struktur perekonomian di suatu wilayah dapat menggambarkan kontribusi sektoral. Di samping itu besarnya kontribusi juga menggambarkan peran sektor dalam perekonomian. Semakin besar peranan suatu sektor dalam perekonomian, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut sebagai *engine growth* atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun struktur perekonomian kota di Jawa Barat memiliki perbedaan karakteristik yang cukup beragam. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kondisi geografis dan potensi masing-masing wilayah. Kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya memiliki karakteristik pedesaan, biasanya dominan pada sektor pertaniannya sedangkan karakteristik perkotaan banyak yang didominasi oleh sektor perindustrian, perdagangan dan jasa.

Peranan ekonomi wilayah kabupaten/ kota ini terhadap perekonomian Jawa Barat setiap tahunnya dapat tergambarkan dari salah satu indikator makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).³ Dengan melihat PDRB seluruh kabupaten/ kota di Jawa Barat, kita dapat melihat wilayah yang memberikan kontribusi cukup dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. PDRB dihitung atas dasar harga konstan, dimana Tahun dasar yang dipakai adalah Tahun 2000.

Tabel I.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

³ BPS. Jawa Barat Dalam Angka 2011

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2010 (dalam juta rupiah)

Tahun	Jumlah
2003	220,965,313
2004	230,003,000
2005	242,884,000
2006	257,499,000
2007	274,180,000
2008	290,171,129
2009	302,629,550
2010	321,875,841

* Sumber BPS (Data diolah)

Dampak globalisasi menunjukkan bahwa perekonomian yang semakin terintegrasi menyebabkan perekonomian suatu daerah mempengaruhi daerah lainnya. Krisis keuangan ekonomi global yang melanda perekonomian dunia sedikit banyak juga berdampak pada perekonomian kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efek yang terjadi adalah ketika perekonomian nasional mengalami perlambatan dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat juga melambat. Hal ini juga berimbas pada perekonomian kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat. Yang turut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2010 (Dalam Persen)

Tahun	Jumlah
2003	3.96
2004	5.71
2005	4.88
2006	5.46
2007	5.80
2008	5.56
2009	5.13
2010	6.32

* Sumber BPS (Data diolah)

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi, misalnya saja di tahun 2005 mengalami perlambatan menjadi 4.88 persen dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 5.71 persen. Terlihat pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan sebesar 5.13 persen dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai angka 5.56 persen.

Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, masalah yang terjadi berikutnya adalah permasalahan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi masing-masing kabupaten/ kota yang hampir 77 persennya mengalami stagnasi selama periode penelitian, 15 persennya mengalami penurunan kontribusi, dan hanya 8 persen yang kontribusi pertumbuhan ekonomi daerahnya mengalami peningkatan.

Seperti yang terjadi di 20 Kabupaten/ kota; Kabupaten Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, serta Kota Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya kontribusi pertumbuhan ekonomi

daerahnya terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu penelitian cenderung mengalami stagnasi. Sedangkan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Indramayu sendiri mengalami penurunan kontribusi.

Kota-kota ini memiliki peran penting dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam dapat berupa kekayaan alam seperti iklim/cuaca, struktur tanah, hasil hutan, pertanian, tambang, dan hasil laut. Sumber daya alam sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena kekayaan alam itu berpengaruh pada penyediaan bahan baku produksi di dalam suatu industri. Banyak daerah yang sangat bertumpu pada kekayaan alamnya untuk kemajuan ekonomi. tetapi jika hanya bertumpu pada kekayaan alam saja, itu tidak menjamin suatu daerah akan mengalami pertumbuhan ekonomi. jika tidak ada sumber daya alam maka tidak ada yang diolah oleh sumber daya manusia. Sumber daya alam sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu daerah , terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi.

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa suatu daerah yang memiliki banyak kekayaan alam belum tentu dapat mengembangkan perekonomiannya jika tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang baik. sumber daya manusia merupakan faktor penting yang perlukan dalam mengolah sumber daya alam. Dalam hal ini sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang potensial untuk memasarkan hasil

produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Jika sumber daya manusia yang cukup besar itu disertai dengan pendidikan yang memadai, maka tentu saja kota di Provinsi Jawa Barat telah dapat memajukan perekonomian daerahnya.

Salah satu faktor yang juga tidak kalah berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) karena selain didukung oleh sumber daya manusia, cepat atau lambatnya suatu proses pembangunan juga di pengaruhi oleh penggunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), semakin canggih/bagus IPTEK yang dimiliki maka semakin cepat pula pembangunan berlangsung. Dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat mendorong pula pergantian pola kerja yang semula banyak menggunakan tangan/manual kini beralih ke penggunaan mesin yang canggih yang lebih memiliki efisiensi, kualitas dan kuantitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan manual hal ini dapat berakibat pada semakin cepatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika kota-kota di Provinsi Jawa Barat memiliki IPTEK yang cukup untuk mengelola seluruh kekayaan alam di daerahnya, maka kota ini dapat menjualnya ke daerah atau negara luar. Dan pasti akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dan digunakan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) untuk membangun fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakatnya yang bertujuan untuk lebih mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakatnya.

Faktor sosial dan politik juga mempunyai pengaruh yang sangat vital terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tanpa keadaan sosial dan politik

yang baik maka akan sulit mendukung berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif di suatu daerah. Apabila terjadi ketidakstabilan sosial dan politik terganggu maka investor akan ragu dalam menanamkan dananya ke suatu daerah.

Pemerintah turut campur tangan dalam perekonomian dengan menggunakan salah satu alat, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan menjalankan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Lipsey (1981), kebijakan fiskal memiliki pengertian kekuasaan pemerintah untuk menggunakan hasil pendapatan pajak dan pengeluarannya dalam rangka mempengaruhi arus lingkaran pendapatan.

Komponen utama dalam pendapatan fiskal berasal dari sektor perpajakan. Hal ini sesuai dengan sistem keuangan daerah, bahwa pajak merupakan bagian yang cukup penting sebagai penerimaan daerah dalam anggaran suatu daerah. Mengingat pentingnya peran pajak dalam menopang perjalanan dan kehidupan negara, sejak awal kemerdekaan para pendiri negara telah menempatkan pajak dalam konstitusi negara yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”.⁴ Selanjutnya, Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah diamanatkan dalam UU RI No.28 Tahun 2009.

⁴ Boediono, *Perpajakan Indonesia Jilid I* (Jakarta: Kawula Indonesia, 1996), hal. 5

Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran suatu daerah (negara), baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan daerah (negara) kemudian menjadi suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola suatu negara atau daerah. Alkadri dalam Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang menyebutkan bahwa diantara variabel penelitiannya, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan pajak.⁵ Perkembangan penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami kenaikan selama sepuluh tahun terakhir ini. Hal ini diperkuat dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik.

Tabel I.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2010 (Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah
2003	517,172,203,700
2004	594,481,373,322
2005	663,503,236,348
2006	795,580,483,097
2007	884,656,897,417
2008	990,118,600,234
2009	1,107,344,693,174
2010	1,328,144,597,185

*Sumber: BPS (Data Diolah)

Akan tetapi, penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dihasilkan. Contohnya, pajak restoran untuk Kota Bekasi terdapat 500 wajib pajak restoran dan sekitar 40 persennya belum patuh untuk membayar pajak yang telah dibebankan. Adapun target pajak restoran yang

⁵ Alkadri, *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selama 1969-1996*, Jurnal Studi Indonesia, Vol. 9. No. 2 Agustus 1999

dibebankan untuk pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp 39,8 milyar dan saat ini yang sudah didapat baru separuhnya. Jumlah tersebut bisa lebih, asalkan seluruh wajib pajak di Kota Bekasi patuh terhadap peraturan.⁶ Untuk Kota Cirebon sendiri realisasi pajak daerah dinilai tidak logis karena jumlahnya lebih kecil dari pada potensinya, dari angka Rp 477 juta potensinya bisa mencapai Rp 600 juta.⁷ Potensi kehilangan pajak pun juga dialami oleh Kota Bandung karena Pemerintah Kota Bandung tidak memungut pajak dari ribuan kafe dan restoran yang tidak berizin, diprediksi kehilangan itu menembus angka miliaran.⁸ Permasalahan penerimaan pajak ini terjadi hampir di semua kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dikelola secara maksimal. Padahal hasil dari penerimaan pajak daerah itu sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.⁹ Sumber penerimaan melalui pajak daerah ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang khususnya undang-undang tentang pemerintah daerah.¹⁰

⁶ Anonim, *Wajib Pajak Kucing-kucingan dengan Petugas*, dipublikasikan 29 Agustus 2011, diakses 22 Januari 2012 (<http://www.radar-bekasi.com/?p=15888>)

⁷ Anonim, *Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir Kota Cirebon tidak logis*, dipublikasikan 26 Oktober 2011, diakses 22 Januari 2012 (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/163340>)

⁸ Anonim, *Bandung Berpotensi Kehilangan pajak Miliaran*, dipublikasikan 20 Desember 2011, diakses 22 Januari 2012 (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/170133>)

⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 10

¹⁰ Marihot P. Siahaan, op. cit., hal. 12

Dalam era otonomi, investasi langsung ke daerah pun merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena investasi akan menggerakkan ekonomi daerah. Hal ini bisa dilihat dari tabel realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Barat berikut ini:

Tabel I.4 Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2010
(Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah
2003	16,074,002,000
2004	10,792,385,000
2005	23,958,955,000
2006	14,714,350,000
2007	12,120,263,000
2008	26,710,314,000
2009	17,160,186,000
2010	14,781,388,000

*Sumber: BKPM (Data Diolah)

Realisasi investasi tersebut merupakan total dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, serta terdiri dari beberapa sektor penyumbang, antara lain; (1) industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, (2) industri karet, barang dari karet dan plastik, (3) industri makanan, (4) industri tekstil, (5) industri kulit, barang dari kulit dan sepatu, (6) industri alat angkutan dan transportasi lainnya, (7) Industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, (8) industri kertas, barang dari kertas dan percetakan, (9) perdagangan dan reparasi, (10) transportasi, gudang dan telekomunikasi, (11) hotel dan restoran, (12) listrik, gas, dan air, (13) konstruksi, dan jasa lainnya.

Akan tetapi yang terjadi adalah investasi sendiri belum menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi (Sri Mulyani Indrawati, 2009).¹¹ Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan investasi seperti perizinan dan pembebasan lahan yang sulit, akses dan sarana infrastruktur yang belum memadai, iklim investasi yang belum kondusif, serta peraturan daerah yang belum memihak terhadap para investor.¹² Hal ini diperkuat oleh Purnama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua¹³;

“...situasi daerah yang kondusif memiliki peranan penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.”

“...iklim kondusif dapat merangsang industri-industri lain untuk masuk ke daerah, karena ada suatu kepercayaan dan keberanian, untuk berinvestasi. Apabila tingkat kredibilitas daerah naik, itu disebabkan kondisi iklim yang kondusif dan perhatian Pemerintah Daerah serta pihak swasta setempat.”

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya adalah penerimaan pajak dan investasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti

¹¹ Erlangga Djumena, *Menkeu: Investasi Masih Belum Jadi Pendorong Ekonomi*, dipublikasikan 24 Agustus 2009 (<http://nasional.kompas.com/read/2009/08/24/15560842/Menkeu.Investasi.Masih.Belum.Mampu.Jadi.Pendorong.Ekonomi>)

¹² Anonim, *BKPPMD: Jabar Menyongsong Boom Invesatasi*, dipublikasikan 5 Desember 2011, 4 Februari 2012 (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/168074>)

¹³ Inggrid Dwi Wedhaswary, *Pertumbuhan Ekonomi Butuh Situasi Kondusif*, dipublikasikan 20 Agustus 2009, diakses 4 Februari 2012 (<http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2009/08/20/01260328/Pertumbuhan.Ekonomi.Butuh.Situasi.Kondusif>)

pengaruh penerimaan pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara besarnya Sumber Daya Alam terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah ada pengaruh antara besarnya Sumber Daya Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah ada pengaruh antara IPTEK terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah ada pengaruh antara Kondisi Politik terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah ada pengaruh antara besarnya Penerimaan Pajak terhadap pertumbuhan ekonomi?
6. Apakah ada pengaruh antara besarnya Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi?
7. Apakah ada pengaruh antara besarnya Penerimaan Pajak dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti membatasi penelitiannya pada “Pengaruh antara penerimaan pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat”

D. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah ada pengaruh antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah ada pengaruh antara penerimaan pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap pajak dan investasi kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.